



KEPAHIANG

SELASA, 07 JUNI 2022

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Ada 21 catatan atas LHP BPK

KEPAHIANG - Meskipun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2021, namun ada beberapa catatan yang harus segera diselesaikan.

Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU menyebutkan ada 21 catatan yang harus segera dituntaskan dalam waktu 60 hari pascaditerimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada 13 Mei 2022 lalu. Adapun catatan tersebut, yakni laporan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang belum lengkap, pajak penghasilan anggota DPRD Tahun Anggaran 2021 belum disetor, serta penetapan KPA dan PPTK belum memiliki dasar kriteria yang diisyaratkan.

"Berikutnya juga ada soal penatausahaan dan pembayaran honorarium jasa tenaga caraka (non-ASN) pada sekretariat daerah, belum tertib dan belum sesuai ketentuan yang berlaku," terang Bupati usai mengikuti rapat paripurna, kemarin (6/5).

Beberapa catatan lain terkait pelaksanaan dan realisasi belanja dana BOS pada 2 sekolah tidak sesuai peruntukan dan memboroskan keuangan daerah. Kemudian ada belanja publikasi pada sekretariat DPRD tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. Juga Realisasi pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada enam OPD tidak sesuai ketentuan dan memboroskan keuangan daerah.

"Catatan lain juga ada terkait belanja makan dan minum jamuan tamu di Sekretariat DPRD tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin atas kendaraan pinjam pakai di sekretariat daerah tidak sesuai peruntukan," beber Bupati.

Selanjutnya dalam catatan BPK juga ada pertanggungjawaban dan realisasi belanja pada sekretariat DPRD tidak dapat diyakini kebenarannya. Belanja modal empat paket pekerjaan pada Dinas PUPR terdapat kelebihan bayar. Juga ada catatan mengenai proses tender atas tiga paket pekerjaan pada penambahan ruang baru puskesmas di lingkungan Dinkes Kepahiang belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran.

"Juga ada kelebihan pembayaran atas rehabilitasi ruang kelas beserta perabotannya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Berikutnya, terdapat potensi kelebihan bayar pada satu paket pekerjaan jalan pusat pemerintahan - Barat Wetan dan potensi kurang penerimaan dari tiga penyedia jasa konstruksi pada Dinas PUPR atastidak dikenakan denda keterlambatan," papar Bupati.

Temuan selanjutnya ada pada pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di BPBD Kabupaten Kepahiang yang belum sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan bayar. Ada juga proses tender atas paket pekerjaan pada pembangunan weterboom yang sepenuhnya belum sesuai ketentuan, dan terdapat potensi kelebihan bayar serta potensi kurang penerimaan dari denda keterlambatan.

Selain itu, ada penyajian investasi jangka panjang permanen pada PDAM Tirta Alami belum sepenuhnya dapat diyakini. Perencanaan dan pelaksanaan investasi pada Bank Bengkulu belum optimal. Pengelolaan aset tetap dan aset tetap lainnya belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah.

"Juga terkait kerja sama aset tanah milik Pemkab Kepahiang yang tidak diketahui nilai kerja samanya dan tidak memberikan kontribusi pendapatan daerah. Terakhir, pengelolaan aset tanah yang belum optimal," jelas Bupati.

Mengenai catatan-catatan tersebut, Pemkab Kepahiang sudah membuat rencana menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Bupati mengatakan tidak semua temuan dan catatan berupa nominal angka. Ada juga temuan yang terkait dengan tata kelola administrasi pemerintahan.

"Kalau untuk jumlah angka temuan, saya tidak hafal. Namun yang pasti seluruh catatan tersebut pasti akan kita tindaklanjuti secepat mungkin dalam waktu 60 hari. Kalau memang nantinya sudah mentok, maka kita akan keluarkan SKK kepada aparat penegak hukum untuk membantu melakukan tekanan kepada OPD untuk segera menindaklanjutinya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Windra Purnawan, SP mengatakan, nanti komisi-komisi yang ada di DPRD akan segera melakukan pembahasan mengenai catatan-catatan tersebut bersama OPD terkait. Agar tidak terjadi kembali persoalan yang sama di tahun-tahun mendatang, harus ada perbaikan administrasi maupun tata kelola pemerintah daerah.

"Agar kedepan WTP yang diterima benar-benar dengan catatan yang baik, Pemkab harus melakukan evaluasi terhadap seluruh jajarannya," kata Windra. (sly)